

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menemukan bahwa masih banyak keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang memanfaatkan bantuan sosial yang mereka terima tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam program keluarga harapan, para penerima manfaatnya diwajibkan untuk memanfaatkan insentif bantuan yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan/atau kesehatan. Misalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti seragam, dan alat tulis, dan/atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ibu dan anak, seperti dibelikan susu, serta asupan gizi lainnya.

Walaupun terdapat aturan dalam memanfaatkan bantuan ini, namun terdapat beberapa cara bagaimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Sariak dalam memanfaatkan bantuan sosial yang mereka terima. Di antaranya yaitu digunakan sesuai dengan ketentuan dari PKH yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai komponennya, pendidikan atau kesehatan, misalnya digunakan untuk membayar uang sekolah, membeli seragam, alat tulis, membeli susu formula. Namun ada juga digunakan untuk hal lainnya seperti membeli bahan makanan kebutuhan pokok yakni beras, ditabung, digunakan untuk mengembangkan usaha, atau bahkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif

seperti membeli baju dan lain sebagainya. Namun menurut pendamping PKH Nagari, sebagian besar dari KPM, uang bantuan hanya digunakan pada dua hal, uang bantuan PKH habis untuk memenuhi kebutuhan komponen (pendidikan/kesehatan) dan digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok (beras). Pemanfaatan bantuan sosial ini disebabkan oleh beberapa alasan sosiokultural, sebagai berikut :

Dalam keluarga, ibulah yang menjadi penguasa rumah, ibu yang memiliki hak milik rumah, ibu yang mengurus rumah, serta ibu jugalah yang mengelola keuangan rumah tangga, jadi ibu yang paling mengerti apa saja kebutuhan rumah tangga. Karena itu pengelolaan uang bantuan sepenuhnya biasanya dilakukan oleh ibu. Ibu cenderung menyembunyikan bantuan sosial dari ayah, ibu menganggap ia yang paling cocok menjadi pengelola uang bantuan karena ia jugalah yang biasanya mengelola keuangan keluarga, ayah biasanya sangat jarang di rumah karena ia orang *sumando*. Karena ibu yang menguasai penuh pengelolaan uang bantuan, uang bantuan jadi banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ibu di keluarga, misalnya digunakan untuk membeli kebutuhan memasak seperti beras, dan lauk pauk serta juga digunakan untuk keperluan merawat anak seperti membeli susu formula, dan dibelikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti membeli perlengkapan alat tulis, membayar uang sekolah, hingga mengganti pakaian seragam sekolah.

Faktor selanjutnya yaitu karena tidak jalannya fungsi ekonomi keluarga. Dalam keluarga penerima manfaat PKH di Nagari Sungai Sariak, baik ayah maupun ibu biasanya bekerja, namun pekerjaan ayah dan ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan

keluarga sepenuhnya. Ayah biasanya hanya bekerja serabutan, sehingga pendapatan yang di dapat sangat kecil dan tidak menentu, selain itu ada banyak juga kasus KPM yang suaminya sudah tidak menafkahi lagi karena sudah bercerai dan lain sebagainya. Ibu biasanya juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, namun pekerjaan yang bisa dilakukan ibu juga sangat terbatas, kemampuan, modal dan relasi yang kurang membuat usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasilnya pendapatan yang didapat tetap saja kurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu ketika bantuan sosial PKH datang, bantuan akan dialokasikan dulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi, seperti membeli kebutuhan dapur yaitu beras dan lauk pauk, serta kebutuhan lainnya yang lebih mendesak, dibandingkan memenuhi kebutuhan pendidikan atau kesehatan yang di nilai bisa di undur.

Dahulu masyarakat nagari memenuhi kebutuhan karbohidratnya dengan memproduksi berasnya sendiri, dahulu mereka memiliki sawah. Tujuan mereka bertani adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka dulu, bukan seluruhnya dijual. Mereka gemar menyimpan beras dalam jumlah banyak di rumah. Kebiasaan seperti ini juga terdapat pada KPM, walaupun mereka tidak memiliki sawah, KPM biasanya membeli beras dalam jumlah banyak dan menyimpannya di rumah, beras dijadikan pegangan subsistensi. Para KPM lebih memilih untuk meminimalisir kemungkinan kelaparan atau tidak terpenuhinya asupan makanan pokok mereka,

dibandingkan memaksimalkan keuntungan dengan memaksimalkan uang bantuan untuk kesehatan dan pendidikan.

Kelenturan dari pengawasan pendamping PKH juga menjadi faktor yang ada. Pendamping PKH akan melakukan pengawasan secara rutin mengenai pemanfaatan bantuan kepada KPM, biasanya dilakukan dengan cara bertanya secara langsung, serta mendengarkan laporan dari ketua kelompok. Seharusnya jika ada pelanggaran maka akan langsung diberikan sanksi. Namun karena pendamping juga merupakan orang asli nagari, ia tinggal berdekatan dengan para KPM jadi ia merasa tidak enak bila sampai memberikan sanksi, mereka juga berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari selain perihal urusan PKH, jadi apabila pendamping memberikan sanksi pada KPM, hubungan mereka akan menjadi canggung dan bisa saja terjadi konflik. Pendamping juga merasa tidak enak memberikan sanksi, dan merasa kasihan jika bantuan sampai ditahan, pendamping hanya memberikan teguran dan peringatan. Selain itu pendamping dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan biasanya juga akan melonggarkan ketentuan yang ada. Seperti memaklumi tindakan dari KPM yang tidak memiliki pilihan lain.

Terakhir yaitu sedikitnya insentif bantuan yang diberikan. Bantuan ini tidak dapat sepenuhnya mengurangi beban pengeluaran dari keluarga miskin, apalagi untuk meningkatkan pendapatan yang ada. Jadi bantuan ini menurut KPM hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka saja, karena inilah mereka banyak menggunakan uang bantuan untuk membeli beras, uang bantuan tidak dapat untuk

memenuhi semua kebutuhan mereka seperti kebutuhan pendidikan dan kesehatan sepenuhnya.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang bisa peneliti berikan, supaya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf hidup KPM dan mengurangi kemiskinan yang dialami dapat tercapai, adalah sebagai berikut :

1. Pada proses pendataan masyarakat miskin, sebaiknya nagari juga memperhitungkan warga nagari yang tidak memiliki dokumen lengkap, karena banyak di temukan masyarakat yang miskin namun tidak memiliki surat-surat yang lengkap untuk mendaftarkan dirinya ke nagari sebagai orang miskin, jadi orang seperti ini sering luput dari program bantuan yang di laksanakan.
2. Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan kesehatan dan pendidikan keluarga miskin, namun pada ketentuan komponen yang dapat menerima PKH hanyalah ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, disabilitas berat dan lansia. Padahal banyak ditemukan masyarakat miskin yang tidak memiliki anak dan juga belum masuk usia lansia namun sakit-sakitan dan membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Masyarakat seperti ini tidak memenuhi persyaratan PKH padahal ia sangat memebutuhakn bantuan PKH, karena itu sebaiknya ketentuan komponen dalam PKH dikaji kembali.
3. Ada banyak ibu pengurus KPM yang membangun usaha, namun sering gagal dan rugi, hal ini karena ketiadaan modal baik modal uang atau modal

pengetahuan untuk mengelola usaha. Karena itu sebaiknya pemerintah juga membuat program penunjang untuk lebih mengasah kemampuan KPM mengenai membangun usaha, bukan hanya teori namun juga prakteknya, misalnya dengan memberikan bantuan modal usaha.

4. Kelompok PKH biasanya hanya dimanfaatkan untuk pertemuan bulanan, dan pertemu peningkatkan kemampuan keluarga (P2K2), padahal kelompok PKH ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal, misalnya dengan membuat kelompok usaha bersama dari perkumpulan kelompok PKH.
5. Lebih menekankan materi mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya pendidikan dan kesehatan di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dibanding materi yang lainnya. Karena masih banyak KPM yang susah mengelola keuangannya dan lebih mementingkan hal lain di bandingkan pendidikan dan kesehatan.
6. Menambah besaran bantuan, karena kebutuhan dibidang kesehatan dan pendidikan telah semakin banyak.

